

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aminuddin Ilmar. 2020. *Buku Ajar Hukum Kewenangan dan Diskresi*. Makassar: Phinamata Media.
- Andi Fahmi Lubis. et al.. 2017. *Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks*, Jakarta: KPPU Press.
- Andi Hamzah. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arini Nur Annisa. 2024. *Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Teori, Konsep, dan Pengujian*, Gowa: Subaltem Inti Media.
- Bagir Manan. 2003. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Eny Kusdarini. 2019. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UNY Press.
- Hedwig Adiando Mau dan Tinton Ditisrama. 2024. *Hukum Tata Negara Indonesia Teori dan Penerapan*. Banyumas: Penerbit Amerta Media.
- Irwansyah. 2024. *Penelitian Hukum. Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Indroharto. 2000. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Jimly Asshiddiqie. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jimly Asshiddiqie. 2018. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muh. Affan R. Tojeng. 2017. *Pencegahan Dan Pengendalian Konflik Kepentingan di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Transparency International Indonesia.
- Maria Farida Indrati S. 2019. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Miriam Budiardjo. 2015. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2016. *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)*. Jakarta: Mahkamah Agung RI dan JICA.
- Philipus M. Hadjon. et al. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Pratiwi, C. S., Purnamawati, S. A., & Fauzi, C. Y. P. 2016. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Leip
- Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Romi Librayanto. 2022. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Mirra Buana Media
- R Juli Moertiono. 2024. *Hukum Perusahaan – Perkembangan Perusahaan & Jenis Usaha di Era Informasi*, Medan: Umsu Press.
- Sri Hartini. Setiajeng Kadarsih. dan Tedi Sudrajat. 2018. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Yuliandri. 2014. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Jurnal/Artikel Ilmiah

- A Ilyas, M I Arisaputra, D Utami M Bakar and A Arifin. 2019. *Natural resource management for sustainable development in managing environmental permit*, OP Conf. Ser. Earth Environ. Sci. 343 012064.
- Andy Gunawan, I Wayan Arthanaya and Luh Putu Suryani. 2019. "*Fungsi AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Acara Tata Usaha Negara*." Jurnal Analogi Hukum. Volume 1 Nomor 1. Universitas Warmadewa, Denpasar.
- Ariyanto Ardiansya dan Arya Sanjaya. 2025. "*Dinamika Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia dalam Rangkap Jabatan Politis (Menteri)*." Journal Scientific of Mandalika, Volume 6 Nomor 4. Institut Agama Islam Negeri Bone. Watampone Sulawesi Selatan.
- Budi Santoso. 2019. "*Implikasi Rangkap Jabatan terhadap Tata Kelola BUMN*". Jurnal Hukum dan Pembangunan. Volume 49 Nomor 2.
- Belly Isnaeni. 2021. "*Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen*." Volume VI Nomor 2. Fakultas Hukum. Universitas Pamulang.
- Bemby Navita. 2025. "*Kedudukan dan Fungsi Lembaga Negara dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*." Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial. Politik dan Humaniora (JURRISH). Volume 4 Nomor 1. Universitas Tidar Magelang.
- Basel Institute on Governance. 2023. "*Pedoman tentang Konflik Kepentingan (Conflict of Interest/COI)*." Basel. Switzerland.
- Febri Handoko & Triana Dwi Lestari. 2025. "*Conflict of Interest Dampak Rangkap Jabatan ASN/TNI/POLRI*." Jurnal Sosial dan Sains. Volume 5 Nomor 5. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM. Indonesia.
- Firdaus Arifin. 2024. "*Kedudukan dan Kewenangan serta Pertanggungjawaban Wakil Menteri dalam menjalankan Pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara*." Jurnal Integralistik. Volume 35 Nomor 1. Universitas Pasundan. Indonesia.
- Hadiz, V. R. 2010. "*Localising power in post-authoritarian Indonesia: A Southeast Asia perspective*." Journal of Contemporary Asia. Volume 40 Nomor 2.
- Jimly Asshiddiqie. 2018. "*Struktur Ketatanegaraan Indonesia Pasca Reformasi*", Jurnal Hukum & Pembangunan. Volume 48 Nomor 1.
- ilik Mulyadi. 2018. "Konflik Kepentingan dalam Pengelolaan BUMN". Jurnal Hukum dan Peradilan. Volume 8 Nomor 3.
- Nur Kumalaningdyah. 2019. "*Pertentangan Antara Diskresi Kebijakan Dengan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi*". Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Volume 26 Nomor 3. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

- Mustika Prabaningrum Kusumawati. 2019. *"Harmonisasi Antara Etika Publik Dan Kebijakan Publik."* Jurnal Yuridis. Volume 6 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Putra Adibil Anam dan Inda Rahadiyan. 2023. *"Pengaturan Jabatan Rangkap Anggota Direksi dan Dewan Komisaris BUMN: Perbandingan Indonesia dengan Amerika Serikat."* Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Volume. 30 Nomor 3. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Rusnan. 2013. *"Kedudukan Wakil Menteri Dan Implikasinya Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia."* Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. Volume 1 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Mataram. Mataram.
- Suherman Toha. 2005. *"Penelitian Masalah Hukum tentang Penerapan Good Corporate Governance Pada Dunia Usaha."* Laporan Akhir.
- Siti Nurjanah. 2021. *"Politik Hukum Larangan Rangkap Jabatan Pejabat Negara"*, Jurnal IUS QUIA IUSTUM, Volume 28 Nomor 1.
- Zufar Zain Nibraska & Naufal Abror Faroja. 2023. *"Tinjauan Yuridis Rangkap Jabatan Dewan Komisaris BUMN guna Mewujudkan Good Corporate Governance dalam Tata Kelola BUMN."* Jurnal Dinamika Hukum. Volume 24 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Ariani Arifin. *"Pelaksanaan Fungsi Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dalam Penanganan Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja"*. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Diyon Erlangga. *"Analisis Konflik Kepentingan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Keuangan Sebagai Komisaris BumN Perspektif Ketatanegaraan Indonesia Dan Etika Politik Islam"*. Skripsi. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga.
- Jaelani, N. A. K. 2025. *"Etika rangkap jabatan wakil menteri BUMN kabinet merah putih perspektif ketatanegaraan Indonesia dan hukum Islam."* Tesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tangerang Selatan, Banten.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 21/PUU-XXIII/2025
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025

Sumber Internet:

- ANTARA News Kalimantan Barat. "Ekonom sebut larangan rangkap jabatan mencegah konflik kepentingan BUMN".
<https://kalbar.antaranews.com/berita/667617/ekonom-sebut-larangan-rangkap-jabatan-mencegah-konflik-kepentingan-bumn> Diakses pada 05 Februari 2026. Pukul 10.19.
- EDUNews.ID. "*Nasional Putusan MK Tegas, Wakil Menteri Dilarang Rangkap Jabatan Komisaris atau Direksi di BUMN/Swasta!*"
<https://share.google/vP4QmSZSd4wfYdOG8> Diakses pada 03 November 2025. Pukul 10.15
- Hukum Online. "*'Simalakama' Rangkap Jabatan: Mengawal Kepentingan Pemerintah dan Potensi Korupsi*"
<https://www.hukumonline.com/berita/a/simalakama-rangkapjabatan--mengawal-kepentingan-pemerintah-dan-potensi-korupsi.com> Diakses pada 27 Agustus 2025. Pukul 16.01
- IDN Times. "CEK FAKTA: Wakil Menteri Boleh Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN".
<https://www.idntimes.com/news/indonesia/cek-fakta-wakil-menteri-boleh-rangkap-jabatan-jadi-komisaris-bumn.com> Diakses pada 27 Agustus 2025. Pukul 15.45
- KOMPAS.id. "*Normalisasi Rangkap Jabatan*".
<https://www.kompas.id/artikel/normalisasi-rangkap-jabatan> Diakses pada 02 November 2025. Pukul 13.02
- KOMPAS.id. "Wamen Sekretaris Negara Diangkat Jadi Komisaris Utama Jasa Marga, ICW Ingatkan Konflik Kepentingan"
<https://www.kompas.id/artikel/wamensesneg-diangkat-jadi-komisaris-utama-jasa-marga-icw-ingatkan-konflik-kepentingan>
 Diakses pada 05 Januari 2026 November 2025. Pukul 23.00
- KOMPAS.id. "Ruang Abu-abu Wamen di Pusaran Bisnis BUMN"
<https://www.kompas.id/artikel/ruang-abu-abu-wamen-di-pusaran-bisnis-bumn> Diakses pada 01 Februari 2026 November 2025. Pukul 17.34
- kumparanBISNIS. "*Wamenkeu Suahasil Rangkap Jabatan Jadi Komisaris PLN, Ini Kata Kemenkeu*".
https://kumparan.com/kumparanbisnis/1zyUFWSX7ta?utm_source=Desktop&utm_medium=copy-to-clipboard&shareID=nqMgTIV49tKg Diakses pada 02 November 2025. Pukul 15.34
- SATELITNEWS.COM. "*Mahkamah Konstitusi Larang Wamen Merangkap Jabatan*"
<https://www.satelitnews.com/140797/mahkamah-konstitusi-larang-wamen-merangkap-jabatan/>
 Diakses pada 03 November 2025. Pukul 10.34
- TI Indonesia. "Potensi Korupsi dan Konflik Kepentingan: Rangkap Jabatan Menteri dan Wakil Menteri,"
<https://ti.or.id/potensi-korupsi-dan-konflik-kepentingan-rangkap-jabatan-menteri-dan-wakil-menteri/>
 Diakses pada 05 Januari 2026. Pukul 13.40